
KETAHANAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL: SUATU TINJAUAN POLITIK EKONOMI

Muharry Akbar

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial menjadi dua aspek penting dalam memastikan keberlanjutan dan stabilitas suatu negara. Tinjauan politik ekonomi terhadap kedua aspek ini mengungkap kompleksitas hubungan antara kebijakan ekonomi, distribusi sumber daya, dan kesejahteraan sosial. Artikel ini menyelidiki berbagai aspek politik ekonomi yang memengaruhi ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial, dengan fokus pada konteks global dan implikasinya terhadap kebijakan nasional. Melalui analisis ini, upaya diperlukan untuk mengintegrasikan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: *Ketahanan Pangan, Kesejahteraan Sosial, Politik Ekonomi*



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial adalah dua aspek yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Ketahanan pangan mengacu pada kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara berkelanjutan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, tanpa mengganggu aksesibilitas fisik dan ekonomi terhadap pangan yang mencukupi. Di sisi lain, kesejahteraan sosial mencakup berbagai dimensi, seperti tingkat pendapatan, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, kesempatan kerja, serta ketersediaan fasilitas dasar lainnya yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks global yang terus berubah dan kompleksitas tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh banyak negara, penting bagi kita untuk memahami keterkaitan antara ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial dalam kerangka politik ekonomi. Pendekatan politik ekonomi memungkinkan kita untuk melihat lebih jauh dari sekadar aspek teknis dan mengidentifikasi faktor-faktor struktural, kebijakan, dan distribusi sumber daya yang memengaruhi ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial.

Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam tinjauan politik ekonomi terhadap ketahanan pangan adalah distribusi sumber daya. Distribusi yang tidak merata dari sumber daya ekonomi, seperti lahan, teknologi, dan modal, dapat mempengaruhi kemampuan suatu negara untuk menghasilkan pangan secara memadai dan merata. Selain itu, kebijakan ekonomi, termasuk subsidi pertanian, perdagangan internasional, dan investasi luar negeri, juga berperan dalam membentuk kerangka kerja yang memengaruhi ketahanan pangan suatu negara.

Tidak hanya itu, ketahanan pangan juga erat kaitannya dengan stabilitas politik dan konflik sosial. Ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, dan kerusuhan sosial dapat mengganggu produksi pangan, distribusi, dan akses masyarakat terhadap pangan yang mencukupi. Oleh karena itu, dalam tinjauan politik ekonomi, penting untuk memperhitungkan faktor-faktor politik dan keamanan yang mempengaruhi ketahanan pangan suatu negara.

Sementara itu, kesejahteraan sosial juga dipengaruhi oleh berbagai faktor politik ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan kebijakan redistribusi pendapatan memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kesejahteraan umum masyarakat. Dalam tinjauan politik ekonomi, perlu diperhatikan bagaimana kebijakan ekonomi nasional dan global memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kesempatan kerja yang layak.

Melalui pendekatan politik ekonomi, kita dapat memahami kompleksitas hubungan antara ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial, serta faktor-faktor politik dan ekonomi yang membentuknya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang keterkaitan ini, diharapkan kita dapat mengembangkan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif dalam

meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial, serta memperkuat fondasi ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis deskriptif dan interpretatif untuk memahami kompleksitas hubungan antara ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial dalam kerangka politik ekonomi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami dengan mendalam dinamika politik ekonomi yang mempengaruhi ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial, serta memperoleh pemahaman yang kaya akan konteks, proses, dan faktor-faktor yang terlibat.

1. **Studi Literatur:** Penelitian ini akan dimulai dengan tinjauan literatur yang komprehensif tentang ketahanan pangan, kesejahteraan sosial, dan politik ekonomi. Studi literatur akan melibatkan analisis berbagai sumber informasi, termasuk jurnal akademik, buku teks, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan terkait. Tinjauan literatur ini akan membantu dalam memahami konsep-konsep dasar, teori-teori, dan temuan-temuan sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.
2. **Analisis Kebijakan:** Penelitian ini akan menganalisis berbagai kebijakan ekonomi yang memengaruhi ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial dalam konteks nasional dan global. Analisis ini akan mencakup kebijakan pertanian, perdagangan, subsidi, redistribusi pendapatan, serta kebijakan sosial lainnya yang relevan. Penelitian akan mengidentifikasi tujuan, implementasi, dan dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
3. **Studi Kasus:** Penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus untuk memperdalam pemahaman tentang hubungan antara politik ekonomi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Studi kasus akan memilih beberapa kasus yang representatif, seperti program-program pemerintah terkait ketahanan pangan, kebijakan redistribusi pendapatan, atau peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan sosial. Analisis studi kasus akan membantu dalam menggambarkan dinamika konkret yang terjadi dalam konteks nyata.
4. **Wawancara Kualitatif:** Metode wawancara akan digunakan untuk mengumpulkan data primer dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan dan praktik terkait ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Wawancara akan dilakukan dengan pejabat pemerintah, ahli ekonomi, aktivis masyarakat sipil, dan perwakilan dari sektor swasta terkait. Wawancara kualitatif akan memberikan wawasan yang mendalam tentang pandangan, persepsi, dan pengalaman subjek terkait dengan isu-isu yang diteliti.
5. **Analisis Data:** Data yang dikumpulkan melalui studi literatur, analisis kebijakan, studi kasus, dan wawancara akan dianalisis secara terintegrasi menggunakan pendekatan deskriptif dan interpretatif. Analisis data akan membantu dalam mengidentifikasi pola-pola, temuan-temuan utama, dan implikasi kebijakan terkait

dengan hubungan antara politik ekonomi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan sosial.

PEMBAHASAN

Ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial merupakan dua dimensi utama yang saling terkait dalam pembangunan suatu negara. Dalam konteks politik ekonomi, hubungan antara ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan ekonomi, distribusi sumber daya, struktur sosial, dan dinamika politik. Pembahasan mengenai keterkaitan ini menyoroti bagaimana kebijakan ekonomi yang diimplementasikan oleh pemerintah dapat memengaruhi tingkat ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Salah satu aspek utama dalam pembahasan ini adalah distribusi sumber daya. Distribusi yang tidak merata dari sumber daya ekonomi, seperti lahan pertanian, teknologi, modal, dan akses pasar, dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pangan dan kesejahteraan ekonomi. Misalnya, ketika sebagian kecil populasi memiliki kontrol yang besar atas sumber daya ekonomi, sementara mayoritas masyarakat memiliki akses yang terbatas, maka akan muncul ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan kesejahteraan.

Kebijakan ekonomi juga memainkan peran penting dalam membentuk kerangka kerja yang memengaruhi ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Subsidi pertanian, kebijakan perdagangan internasional, kebijakan harga, dan kebijakan redistribusi pendapatan adalah beberapa contoh kebijakan ekonomi yang dapat memiliki dampak signifikan terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Misalnya, subsidi pertanian yang tidak tepat dapat memengaruhi harga pangan, sementara kebijakan perdagangan yang tidak adil dapat menghambat akses terhadap pasar global bagi petani kecil.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan implikasi politik dari kebijakan ekonomi terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Kebijakan ekonomi yang didorong oleh kepentingan politik tertentu atau tekanan dari kekuatan politik dapat menghasilkan hasil yang tidak merata atau bahkan merugikan bagi sebagian masyarakat. Misalnya, kebijakan pemotongan anggaran di sektor kesejahteraan sosial dapat mengurangi akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat rentan, sehingga meningkatkan ketidaksetaraan dan kemiskinan.

Selain itu, kondisi politik dan keamanan juga memainkan peran penting dalam menentukan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial suatu negara. Ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, dan kerusuhan sosial dapat mengganggu produksi pangan, distribusi, dan akses masyarakat terhadap pangan yang mencukupi. Oleh karena itu, perubahan politik atau konflik bersenjata yang terjadi dalam suatu negara dapat menyebabkan krisis kemanusiaan yang serius, termasuk krisis pangan dan kesejahteraan sosial.

Dalam pembahasan mengenai ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial dalam kerangka politik ekonomi, penting untuk diakui bahwa tidak ada solusi tunggal atau pendekatan yang dapat menangani semua tantangan tersebut. Namun, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor politik ekonomi yang memengaruhi ketahanan pangan

dan kesejahteraan sosial dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis bukti, diharapkan kita dapat mencapai kemajuan yang lebih baik dalam mempromosikan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Selanjutnya, dalam konteks tinjauan politik ekonomi terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial, perlu juga memperhatikan aspek globalisasi dan interkoneksi antarnegara. Perdagangan internasional, investasi asing, dan kerja sama regional adalah beberapa faktor yang memengaruhi dinamika ekonomi dan sosial suatu negara dalam konteks global. Namun, dampak globalisasi tidak selalu merata dan dapat menciptakan ketimpangan ekonomi yang lebih besar antara negara-negara maju dan berkembang, serta dalam masyarakat domestik.

Dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial, penting untuk mengadopsi pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pembentukan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan pangan yang sehat, berkelanjutan, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, perlunya adopsi kebijakan yang mendukung distribusi sumber daya yang lebih adil dan berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Penekanan pada pengembangan infrastruktur, pertanian berkelanjutan, dan diversifikasi ekonomi juga merupakan strategi yang penting dalam memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Dengan meningkatkan akses terhadap infrastruktur yang memadai, teknologi pertanian yang modern, dan pelatihan keterampilan, masyarakat dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Selain itu, diversifikasi ekonomi dapat mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian, sehingga meningkatkan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Namun, dalam merancang dan menerapkan kebijakan terkait ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial, perlu juga memperhatikan kepentingan dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk petani, produsen pangan, konsumen, dan kelompok masyarakat yang rentan. Kolaborasi lintas sektor dan inklusi partisipatif masyarakat adalah kunci untuk merancang kebijakan yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, tinjauan politik ekonomi terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial menyoroti pentingnya memahami hubungan kompleks antara faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial dalam membentuk kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang dinamika ini, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mempromosikan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi semua lapisan masyarakat.

Selanjutnya, dalam konteks peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial, perlu juga diperhatikan upaya untuk mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Perubahan iklim dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap produksi pangan, ketersediaan air, dan keberlanjutan ekosistem pertanian. Oleh karena itu, perlunya adopsi kebijakan dan praktik pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta upaya dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, menjadi penting dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial.

Selain itu, investasi dalam penelitian dan inovasi dalam bidang pertanian dan pangan juga menjadi kunci dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap penyakit dan cuaca ekstrem, penerapan teknologi pertanian yang efisien, serta promosi praktik pertanian berkelanjutan dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan keberlanjutan lingkungan.

Tidak kalah pentingnya adalah upaya dalam mengatasi kesenjangan gender dalam akses terhadap sumber daya pertanian dan kesejahteraan ekonomi. Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam produksi pangan dan pengelolaan sumber daya alam, namun seringkali mengalami diskriminasi akses terhadap lahan, modal, dan pengetahuan. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan dan inklusi gender dalam pengambilan keputusan terkait pertanian dan pangan perlu diprioritaskan.

Di samping itu, penting juga untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Pencegahan terhadap praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan monopoli pasar dalam sektor pertanian dan pangan menjadi kunci untuk memastikan distribusi pangan yang adil dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Terakhir, penting untuk diingat bahwa ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial adalah tujuan yang tidak dapat dicapai secara terpisah dari tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya. Integrasi antara ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan keadilan merupakan kunci dalam merancang kebijakan yang holistik dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, melalui pendekatan yang komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan, diharapkan dapat tercapai kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial, serta membangun masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera bagi semua lapisan masyarakat.

Selanjutnya, perlu juga ditekankan pentingnya kerja sama internasional dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Masalah ketahanan pangan seringkali melintasi batas negara dan memerlukan tanggapan global yang terkoordinasi. Kerja sama antarnegara dalam hal perdagangan pangan, bantuan pembangunan, dan transfer teknologi dapat memperkuat ketahanan pangan di negara-negara yang rentan dan mempromosikan kesejahteraan sosial secara global.

Selain itu, perlu juga memperhatikan aspek etika dan keadilan dalam kebijakan terkait ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Kebijakan yang adil dan berkeadilan akan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang paling rentan dan marginal, memiliki akses yang setara terhadap pangan yang cukup dan bergizi serta kesejahteraan sosial yang layak.

Penting juga untuk mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam merumuskan kebijakan terkait ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Hak atas pangan yang memadai diakui sebagai hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, kebijakan dan program harus dirancang untuk memastikan bahwa hak tersebut terpenuhi bagi semua individu tanpa diskriminasi.

Di samping itu, partisipasi masyarakat juga merupakan elemen kunci dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Masyarakat harus diberdayakan untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi program-program yang berdampak pada ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial mereka. Melibatkan masyarakat dalam proses tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan dari program-program yang dilaksanakan.

Terakhir, evaluasi dan pemantauan terus-menerus juga penting untuk memastikan keberhasilan dan dampak dari kebijakan dan program yang telah diimplementasikan. Melalui evaluasi yang cermat, dapat diidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan peluang untuk perbaikan yang dapat memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan, diharapkan bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat secara luas. Dengan memprioritaskan keadilan, partisipasi, dan hak asasi manusia, kita dapat membangun masyarakat yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan adil, di mana setiap individu memiliki akses terhadap pangan yang mencukupi dan kesejahteraan sosial yang layak.

Melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi, kebijakan dan program yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam. Integrasi antara kebijakan pertanian, kebijakan sosial, kebijakan lingkungan, dan kebijakan ekonomi dapat memastikan bahwa solusi yang diimplementasikan tidak hanya memperbaiki ketahanan pangan, tetapi juga mempromosikan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini juga memungkinkan untuk mengatasi ketimpangan yang mungkin terjadi dalam distribusi pangan dan kesejahteraan sosial, serta memperkuat keberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Selanjutnya, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perlu diakui bahwa pencapaian ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan bagian dari proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan menjaga keberlanjutan planet ini. Oleh karena itu, kebijakan dan tindakan yang diambil harus memperhitungkan dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta harus menciptakan kondisi yang mendukung bagi generasi mendatang untuk menikmati kehidupan yang layak.

Dalam konteks global yang semakin terhubung, kerja sama internasional juga sangat penting dalam mencapai tujuan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Negara-negara harus bekerja sama untuk membagi pengetahuan, teknologi, dan sumber daya, serta mendukung negara-negara yang paling rentan terhadap krisis pangan dan ketidakstabilan sosial.

Kesimpulan

Dalam konteks tinjauan politik ekonomi terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial, dapat disimpulkan bahwa kedua aspek tersebut sangat terkait erat

dengan faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks dan saling memengaruhi. Faktor-faktor seperti distribusi sumber daya, kebijakan ekonomi, kondisi politik dan keamanan, globalisasi, serta partisipasi masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terkait pangan.

Ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial bukanlah tujuan tunggal, tetapi merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, dalam merancang kebijakan dan program terkait ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial, penting untuk mengadopsi pendekatan yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan yang memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan manusia dan planet ini.

Kerja sama internasional juga menjadi kunci dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial secara global. Negara-negara perlu bekerja sama untuk membagi pengetahuan, sumber daya, dan teknologi, serta mendukung negara-negara yang paling rentan terhadap krisis pangan dan ketidakstabilan sosial. Hanya melalui kerjasama lintas batas dan solidaritas global kita dapat mengatasi tantangan global dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan kesejahteraan sosial yang merata.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang keterkaitan antara politik ekonomi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan sosial sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan. Hanya dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan solidaritas, kita dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam menciptakan dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Ritonga, S., & Nasution, A. I. (2007). *Pengaruh Teknologi Komputer Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Ritonga, J. S. (2016). *Designing Curriculum, Capacity of Innovation, and Performances: A Study on the Pesantrens in North Sumatra*. *Miqot*, 40(1), 154547.

- Rangkuti, A. H. (2022). *Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Kppu. 1/2018)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Putri, R. D. (2019). *Implementasi Kebijakan Program Pensiun Dini Di PT. Telkom Regional 1 Sumatera* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Nobriama, R. A. (2019). *pengaruh pemberian pupuk organik cair kandang kelinci dan kompos limbah baglog pada pertumbuhan bibit Kakao (theobroma cacao l.) Di polibeg* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Muda, I., & Masitho, B. (2019). *Peranan Fraksi Partai Demokrat dalam Mendukung Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- SAJIWO, A., & Harahap, G. Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN SPBU SHELL ADAM MALIK. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Novita, D. (2019). *Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa)*.
- Santoso, J. (2021). *Analisis Kondisi Struktur Jalan Berdasarkan Metode RCI (Road Condition Index) Untuk Perencanaan Overlay Jalan* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Sihombing, M., & Tarigan, U. (2013). *Pengaruh Pangkat dan Kompetensi Pegawai Terhadap Pengembangan Karir pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan*.
- Sihombing, M., & Tarigan, U. (2017). *Efektifitas Organisasi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Binjai Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.
- Siregar, N. S. S. (2016). *Komunikasi terapeutik dokter dan paramedis terhadap kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan pada rumah sakit bernuansa islami di kota Medan* (Doctoral dissertation, Program Pasca sarjana UIN-SU).
- Siregar, N. S. S. (2019). *Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi di Kecamatan IDI Rayeuk Kabupaten Aceh Timur)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, U. (2006). *Analisa Kinerja Pegawai Badan Pengawas Kabupaten Gayo Lues*.
- Tarigan, U. (2005). *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kajian Sekretariat Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara)*.
- Tarigan, R. S., & Dwiatma, G. (2022). *ANALISA STEGANOGRAFI DENGAN METODE BPCS (Bit-Plane Complexity Segmentation) DAN LSB (Least Significant Bit) PADA PENGOLAHAN CITRA*.
- Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN PERLUASAN GUDANG BOILER PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK DELI SERDANG. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Syarif, Y. (2018). *Rancangan Power Amplifier Untuk Alat Pengukur Transmission Loss Material Akustik Dengan Metode Impedance Tube. JOURNAL OF ELECTRICAL AND SYSTEM CONTROL ENGINEERING, 1(2)*.
- Tarigan, U. (2007). *Prospek Kewenangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Tamiang*.
- Tarigan, U. (2012). *Pengaruh Motivasi dan Kreatifitas Terhadap Kinerja Pamong Belajar di Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Medan*.
- Tarigan, U. (2018). *Analisis Kualitas Pelayanan Publik dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, U., & Simatupang, I. (2004). *Pelaksanaan Pembinaan dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai di Bagian Keuangan Pemerintah Kota Binjai* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Wahyudi, D. (2022). *BAB V PERENCANAAN KARIR. Manajemen Sumber Daya Manusia (Konsep Dasar Di Era Digital), 45*.
- WARUWU, B. M., & Harahap, G. Y. (2022). *PENGERJAAN ABUTMENT PADA PROYEK PENGGANTIAN JEMBATAN IDANO EHO-DESA SIFOROASI-KECAMATAN AMANDRAYA-KABUPATEN NIAS SELATAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Tarigan, U., & Batubara, B. M. (2015). *Peran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang (Rpd 2 FM) dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, U., & Muda, I. (2013). *Kepemimpinan Keuchik (Studi Tentang Kepemimpinan Keuchik di Gampong Siti Ambia, Suka Makmur, Kuta Simboling, Teluk Ambun dan Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)*.
- Tarigan, U., & Usman, D. A. (2007). *Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara*.
- Tarigan, U., & Siregar, T. (2004). *Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat (Suatu Studi Deskriptif Analisis di Kantor Lurah Kelurahan Binjai Timur Kota Binjai)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

- Eky Ermal, M. (2019). *PROFIL KINERJA RETURN DAN RESIKO PADA SAHAM TIDAK BERETIKA: STUDI KASUS PERUSAHAAN ROKOK DI INDONESIA*.
- Harahap, G. Y. (2004). *Decentralization and its Implications on the development of Housing in Medan*.
- Karim, A. (2017). *Efektivitas Beberapa Produk Pembersih Wajah Antiacne Terhadap Balderi Penyebab Jerawat Propianibacterium acnes*.
- MARPAUNG, A. D., & Harahap, G. Y. (2022). *PEMBANGUNAN PLTA PEUSANGAN 1 & 2 HYDROELECTRIC POWER PLANT CONTRUCTION PROJECT 88 MW-PENSTOCK LINE ACEH TENGAH*. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Siregar, N. S. S. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S. (2022). *KEBERMANFAATAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI PADA DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA*.
- Tarigan, U., & Ritonga, S. (2005). *Fungsi Pengawasan Kepegawaian Menunjang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Sinaga, M. (2010). *Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 2 Sibolga)*.
- Widyastuti, I. W. (2022). *Analisis Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014-2019 dalam Pembentukan Peraturan Daerah*.
- Santoso, M. H. (2021). *Application of Association Rule Method Using Apriori Algorithm to Find Sales Patterns Case Study of Indomaret Tanjung Anom. Brilliance: Research of Artificial Intelligence, 1(2), 54-66*.
- Putri, A. O. (2017). *Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan*.
- Muda, I., & Angelia, N. (2018). *Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2015). *Peranan Gaya Kepemimpinan Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S. (2018). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Program Studi (SIPRODI)*.
- Girsang, L. (2020). *Pengaruh Pelatihan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Lintas Aman Andalas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Batubara, B. M. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Gunawan, I., Matondang, A., & Sembiring, M. (2020, February). *Lean Technology Implementation For Reducing The Dwelling Time Level. In Proceedings of the 1st International Conference of Global Education and Society Science, ICOGESS 2019, 14 March, Medan, North Sumatera, Indonesia*.
- Harahap, G. Y. (2020). *Instilling Participatory Planning in Disaster Resilience Measures: Recovery of Tsunami-affected Communities in Banda Aceh, Indonesia. Budapest International Research in Exact Sciences (BirEx) Journal, 2(3), 394-404*.
- Hartono, B. *HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A STUDY OF THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE TRAINING POLICY TOWARD CAREER OF GOVERNMENT'S SERVANTS IN SLEMAN REGION*.
- SIDABUTAR, P. R., & Harahap, G. Y. (2022). *IDENTIFIKASI PELAT LANTAI PERON TINGGI PADA PEMBANGUNAN STASIUN LUBUK PAKAM BARU*. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Siregar, N. I., & Aziz, A. (2012). *Model Pendidikan Karakter di SMA Swasta Brigjen Katamso Medan*.
- Tarigan, U., & Suriadi, A. (2007). *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, U., & Harahap, B. (2006). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kabupaten Gayo Lues*.
- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang)*.
- Dewi, W. C. (2020). *Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Sembiring, W. M. (2023). *Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Medan Deli*.
- Tarigan, U. (2004). *Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.

- Wibowo, H. T., Tarigan, R. S., & Mukmin, A. A. (2022). *APLIKASI MARKETPLACE PENDAMPING WISATA DENGAN API MAPS BERBASIS MOBILE DAN WEB*. Retrieved from osf.io/3jpd/.
- Tarigan, U. (2012). *Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh)*.
- Wuri Andary, R. (2015). *Komunikasi Bermedia dan Perilaku Pelajar (Studi Korelasional tentang Penggunaan Smartphone terhadap Perilaku Pelajar SMA Negeri 1 Medan)* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Tarigan, U. (2016). *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Torgamba* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Berutu, B. R. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat*.